

## BAB IV

### IDENTIFIKASI PEMIKIRAN MASTUHU

#### A. Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam Mastuhu dalam Dunia Pendidikan Sekarang.

Apabila diukur dari kurun waktu, maka pemikiran Pendidikan Islam oleh Mastuhu yang dituangkannya dalam Buku *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* yang diterbitkan di tahun 1994 dan *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* pada tahun 1999 tergolong belum lama. Dan secara rinci, penulis tidak mengetahui pasti kapan pemikiran tersebut muncul, namun penulis memperkirakan bahwa pemikiran Mastuhu tentang pendidikan Islam dalam buku *Dinamika Sistem Pendidikan Islam* telah beliau rancang sebelum tahun 1994, yaitu berkisar antara tahun 1984-1999 ketika Mastuhu berkarir di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Disamping itu pula gagasan dan pemikiran Mastuhu terhadap pendidikan Islam ini terlihat sangat modernis dan hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan semasa sekolah dan lingkungan kerja Mastuhu di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang pada masa itu tengah dikembangkan pemikiran Islam modernis dan rasional oleh Harun Nasution selaku Rektor. Sedangkan pemikiran serta gagasan Mastuhu terhadap pendidikan Pesantren jauh sebelum buku tersebut diterbitkan, yaitu di tahun 1989 yang merupakan disertasi beliau dalam bidang Komunikasi Pembangunan pada Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dari gagasan dan pemikiran Mastuhu yang telah diungkapkan di Bab III di atas, maka pemikiran Mastuhu ini masih tergolong belum lama dan tampak masih sangat relevan untuk diterapkan di dunia pendidikan dewasa ini. Bahkan pemikiran Mastuhu tersebut akan memberikan inspirasi kepada pemikir-pemikir pendidikan saat ini, khususnya yang mempunyai obsesi yang sama yaitu mencari paradigma pendidikan baru yang semakin Islami dari waktu ke waktu dan bukan mencari paradigma pendidikan Islam. Istilah obsesi Mastuhu ini menurut Hasan Langgulung, selaku pemberi kata pengantar di awal buku tersebut bisa dikatakan sebagai *Islamisasi Ilmu*<sup>1</sup> dengan segala cabang dan rantingnya.

Upaya Mastuhu untuk mencari paradigma baru pendidikan yang semakin Islami ini dilandasi dari kecemasan Mastuhu terhadap kondisi objektif-dunia saat ini. Menurut Mastuhu, moral telah dikesampingkan yang merupakan bagian esensial dari kehidupan manusia. Nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam tata kehidupan modern mulai terancam. Dan perlu disadari pula menurut beliau bahwa ilmu tidak pernah memberikan patokan moral sehingga sangat diperlukan konsepsi-konsepsi yang islami, yang tentunya tanpa disertai sikap apriori dan kebencian terhadap kaum Barat.

Kecemasan terhadap kondisi ini ternyata juga dialami oleh Abuddin Nata. Menurut beliau, masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya, namun disisi lain ilmu dan teknologi canggih tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas

---

<sup>1</sup>Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). h. xvi

(akhlak) yang mulia.<sup>2</sup> Dunia modern saat ini, khususnya di Indonesia ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran dan keadilan, tolong menolong serta kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal dan saling merugikan.

Manusia terus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan mengeksploitasi alam sehingga telah merusak keseimbangan alam. Manusia kemudian merasa dirinya sangat unggul karena penemuan ilmu pengetahuan lewat otaknya yang brilian, membuat dia semakin berambisi untuk menaklukkan alam, karena menganggap alam sebagai objek yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akibatnya, yang terjadi saat ini adalah kemarahan alam yang balik menyerang manusia dalam bentuk banjir, kekeringan, pencemaran lingkungan, krisis energy, yang merupakan ancaman yang paling hebat, yang sesungguhnya adalah akibat ulah manusia itu sendiri dengan hasil penemuannya.

Dari uraian tentang keadaan masyarakat modern saat ini, dapat dengan jelas kita lihat bahwa krisis yang dihadapi oleh masyarakat modern pada dasarnya adalah masalah pengembangan ilmu pengetahuan yang terpisah dari agama yang menyebabkan ilmu yang berkembang adalah ilmu yang bebas nilai. Hal ini dipicu karena derasnya arus sekularisme dan materialisme yang dihembuskan kaum Barat dengan prinsip bahwa agama terpisah dari ilmu pengetahuan sehingga ilmu itu bersifat bebas nilai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemisahan ilmu pengetahuan dengan agama dan pengembangan ilmu bebas nilai pada dasarnya

---

<sup>2</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

telah menyebabkan timbulnya krisis pada masyarakat modern yang ditandai dengan krisis moral, terjadinya eksploitasi terhadap alam, tidak adanya kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup yang hakiki yang merupakan refleksi dari sekularisme, serta kehidupan manusia yang cenderung bersifat materialis yang telah hampir membawa manusia pada jurang kehancuran. Untuk itu, diperlukan suatu upaya untuk kembali mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama melalui konsep yang ditawarkan oleh Mastuhu tersebut, baik itu konsep manusia dalam pendidikan, konsep tujuan, konsep pendidik dan output pendidikan serta konsep metodologi dan materi ajar.

*Yang pertama*, bertolak dari konsep manusia yang bersifat integral-holistik tadi, maka menurut Mastuhu sistem pendidikan Islam berorientasi kepada persoalan *dunia* dan *ukhrawi* sekaligus. Oleh karena itu, salah satu prinsip sistem pendidikan Islam adalah keharusan untuk menggunakan metode pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia: meliputi dimensi jasmani-rohani dan semua aspek kehidupan, baik yang dapat dijangkau dengan akal maupun yang hanya diimani melalui kalbu. Semuanya dikembangkan secara menyeluruh dan seimbang bukan hanya akalnya, tetapi juga kalbunya; bukan hanya lahiriyah saja, tetapi juga batiniyahnya.

*Kedua*: Konsep tujuan pendidikan Islam. Dari gambaran lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, menurut Mastuhu terlihat perbedaan mendasar antara sistem pendidikan madrasah maupun pesantren dengan sistem pendidikan umum. Sebagaimana terlihat dalam lembaga pendidikan Islam seperti madrasah menurut Mastuhu, dalam perjalannya, jalur

pendidikan ini berbeda secara tajam dengan jalur sekolah umum, baik dalam perspektif melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun dalam persoalan lapangan kerja. Menyadari adanya sistem pendidikan nasional dan hak asasi anak untuk memilih bidang studi lanjutan dan lapangan kerja yang diinginkan, maka diusahakan agar anak-anak madrasah memperoleh kesempatan yang sama untuk memasuki Perguruan Tinggi Umum (PTU). Demikian pula sebaliknya, anak-anak dari jalur pendidikan umum memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Agama, semacam IAIN. Tetapi dalam kenyataannya, tetap menunjukkan adanya distingsi yang berbeda secara tajam. Anak-anak dari jalur pendidikan madrasah tidak mampu bersaing secara penuh dengan anak-anak dari sekolah umum dalam persaingan memasuki PTU. Demikian pula halnya dengan persoalan menggapai berbagai lapangan kerja. Sebaliknya, anak-anak dari jalur pendidikan umum tidak mampu bersaing secara penuh dengan anak-anak madrasah dalam proses studi di IAIN dan meraih lapangan kerja keagamaan.

Disamping itu pula rumusan tujuan pendidikan pesantren yang di rangkum Mastuhu dari pendapat para kyai pengasuh pesantren. Rumusan tersebut tampak jelas menyebutkan bahwa pesantren sangat menekankan pentingnya tegaknya Islam di tengah-tengah kehidupan sebagai sumber utama moral atau akhlak mulia, dan akhlak mulia ini merupakan kunci rahasia keberhasilan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, orientasi tujuan pendidikan pesantren sesungguhnya masih lebih banyak bersifat *inward looking* dari pada *outward looking*, atau dengan kata lain, masih lebih banyak melihat ke dalam dari pada ke luar. ‘Pandangan ke dalam’

berpendapat bahwa dengan tegak dan tersebarnya agama Islam di tengah-tengah kehidupan, maka kehidupan bersama dengan sendirinya akan menjadi baik. Jadi semacam ada *trickling down effect*, yaitu efek *moral baik* yang diturunkan sebagai akibat tegaknya Islam di tengah-tengah kehidupan. Dengan demikian, sebenarnya ‘pandangan ke dalam’ itu berfikir *alternative* dan *otomatis*. Yang dalam hal ini Islam sebagai *alternative* atau pilihan untuk menggantikan tata nilai kehidupan bersama, jika kita menginginkan kehidupan bersama yang lebih baik atau lebih maju. Sebaliknya ‘pandangan ke luar’ tidak berfikir *alternative* maupun *otomatis*, tetapi berfikir melengkapi kekurangan, meluruskan yang bengkok atau memperbaiki yang salah atau rusak, dan memberikan sesuatu yang baru yang belum ada dan diperlukan. Dengan demikian, prioritas pertama dari ‘pandangan ke luar’ ialah tegak dan majunya kehidupan bersama berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaannya sendiri; kemudian, agama membantu, melengkapi kehidupan bermasyarakat tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat agama Islam.

Dari hal tersebut, terlihat masih adanya dikotomi tersebut, sehingga Mastuhu pun akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang ideal adalah terwujudnya sebuah pendidikan islami. dengan pengertian sifat yang melekat dan pernah terbukti dalam sejarah atau tradisi keilmuan yang pernah dimiliki kebudayaan Islam. Sebuah tujuan yang tidak memisahkan, namun memadukan dua buah tujuan yaitu antara tujuan pendidikan sekuler yang menjadikan kehidupan duniawiah sebagai tujuan final dan tujuan pendidikan Islam yang menjadikan kehidupan ukhrawiyah sebagai tujuan final.

*Ketiga*, konsep pendidik dan output pendidikan. Berbicara tentang pendidik, Mastuhu menyebutkan bahwa pendidik paling tidak harus memiliki tiga syarat ini. *Pertama*, Pendidik harus memiliki komitmen tinggi, mengabdikan dan merasakan pendidikan sebagai panggilan tugas. Hal ini berarti setiap profesi sebagai pendidik dikembangkan semata-mata untuk memberikan layanan tertentu kepada masyarakat dan memandang profesi yang diemban bukan sekedar mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian "pengabdian kepada masyarakat." *Kedua*, seorang pendidik harus profesionalisme, lengkap dengan kepekaan misi dan ketajaman visi serta kecanggihan terhadap metodologi, *Ketiga*, Seorang pendidik baik guru, dosen maupun ilmuwan perlu memiliki penghasilan yang cukup agar benar-benar memiliki tanggalkan 30 hari dalam sebulannya, dalam artian kesejahteraan pendidik perlu diperhatikan

Begitupula dengan output pendidikan islam. Dalam bab terdahulu penulis lebih menekankan kepada output pendidikan pesantren, yang menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam. Mastuhu menyebutkan, salah satu kelemahan lembaga pendidikan islam semacam pesantren terletak pada 'lemahnya visi dan tujuan yang dibawa oleh pendidikan pesantren'. Hal ini menyebabkan kurang memadainya kualitas *out put* atau alumni sebuah lembaga pendidikan. Di antara kritik Mastuhu terhadap alumni lembaga pendidikan pesantren adalah bahwa produk-produk lembaga ini sering dianggap kurang siap untuk berperan dan mewarnai kehidupan modern. Kemampuan para alumni pesantren sangat terbatas ketika diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan nyata kehidupan modern.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, Mastuhu,

Kritik terhadap *output* atau alumni pendidikan pesantren pun juga dikemukakan oleh Nurcholish, antara lain: (1) dalam konteks dunia kerja, alumni pesantren hanya dapat mengajar di lembaga-lembaga sejenis pesantren, seperti madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, dan belum memadai untuk mengajar di sekolah-sekolah umum atau perguruan tinggi, (2) jika dikaitkan dengan kebutuhan menjadi pegawai negeri, alumni pesantren yang semula dikehendaki menjadi orang-orang paling agama saja, (3) jika ada alumni yang berhasil menjadi wirausahawan, kemampuan wirausahanya bukanlah hasil didikan yang diperoleh dari pesantren, (4) dalam menjalankan perannya di masyarakat, alumni pesantren kurang dapat memainkan peranan yang lebih kreatif dan inovatif serta kurang dapat bersikap adaptif terhadap dunia luar, (5) dalam hubungannya dengan partisipasi dalam pembangunan masyarakat, alumni pesantren tampaknya kurang mampu membina hubungan dan kerjasama dengan orang lain.<sup>4</sup>

Sebagai respon terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup, sehingga Mastuhu pun akhirnya merumuskan secara lugas, bahwa tujuan pendidikan islam adalah melahirkan *output* pendidikan yang diharapkan memiliki: (1) kemampuan untuk mengembangkan kemampuan belajar (*learning ability*), untuk lebih lanjut mengembangkan kemampuan metodologi ilmiah, (2) memiliki kegemaran belajar dan berani tampil beda dan bernilai tambah, (3) memiliki tiga kemampuan yang merupakan satu kesatuan: *amanah dan arif, intelegensi tinggi dan komprehensif, professional dan* (4) *output* pendidikan harus mampu

---

<sup>4</sup> . Nurcholish Madjid “Kesenjangan antara Pesantren dengan Dunia Luar”, dalam Bilik-Bilik Pesantren Potret Sebuah Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 96-98



memikirkan dan mengembangkan iptek dan perspektif imtaq (iman dan taqwa) dan menguraikan imtaq dalam bahasa iptek.

*Terakhir*, konsep metodologi dan materi ajar. Menurut Mastuhu, pendidikan adalah bidang kerja yang secara langsung menyiapkan manusia-manusia untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, Mastuhu menggambarkan pendekatan dan metodologi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi anak didik dan memanfaatkan kesempatan secara optimal untuk *self realization* atau *self actualization*;
2. Mengembangkan metode rasional, empiris, *bottom up* dan ‘menjadi’;
3. Materi ajar harus dapat memadukan antara aspek tradisional dan modern
4. Memberikan bekal atau landasan yang kuat sampai dengan tingkat menengah atas, yang siap dikembangkan ke pelbagai keahlian.

Dari keempat pendekatan atau metodologi tersebut, maka tergambar bahwa Mastuhu menginginkan cara belajar pasif sekarang harus ditinggalkan dan menuju kepada cara belajar aktif. Dari murid menunggu, menerima dan memperoleh materi pelajaran sebanyak-banyaknya diubah menjadi aktif dan mencari dan menguasai metodologi berfikir yang kuat dan konstruktif. Dari dimensi belajar ‘memiliki’ menjadi belajar ‘menjadi’ atau dari belajar ‘memori’ menjadi metode belajar ‘mengolah’ dan menganalisis’, kemudian ‘mensistesa’, ‘mengevaluasi’, dan ‘mengantisipasi’. Oleh karena itu, untuk mencapai obsesi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan dan pengembangan metode belajar mengajar pendidikan. Perubahan yang dimaksud Mastuhu pun antara lain dengan;

(1) mengubah cara belajar dari model *warosan* menjadi cara belajar pemecahan masalah; (2) dari hafalan ke dialog, (3) dari pasif ke heuristic; (4) dari memiliki ke menjadi, (5) dari mekanis ke kreatif, (6) dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat; (7) dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan, menjadi memandang dan menerima ilmu dalam dimensi proses, dan (8) fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, tetapi mengolah dan mengembangkan hati (moral) dan keterampilan.<sup>5</sup>

Disamping aspek metodologi, juga terdapat aspek materi ajar yang tidak kalah pentingnya dalam tercapainya keberhasilan pendidikan peserta didik, terutama pada saat proses belajar-mengajar. Materi ajar yang dimaksud Mastuhu adalah materi ajar yang dapat memadukan aspek tradisional dan aspek modern dengan sifat, corak dan kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal ini, maka teori-teori yang diungkapkan oleh Mastuhu yang dinamakannya dengan konsep *Pendidikan Islami* atau *Islamisasi Ilmu (menurut pakar pendidikan)* sungguh masih sangat relevan dan diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang ini.

Mengaitkan ‘Islam’ dengan kategori keilmuan, seperti konsep pendidikan, menurut Mastuhu, umumnya berhadapan dengan pengertian Islam sebagai sesuatu yang final. Dalam kategori ini, Islam dapat dilihat sebagai kekuatan iman dan taqwa, sesuatu yang sudah final. Sedangkan kategori ‘ilmu’, seperti dikukuhkan di atas, memiliki ciri khas berupa perubahan, perkembangan dan tidak mengenal

---

<sup>5</sup>Ibid, 49.

kebenaran absolut. Semua nilai kebenarannya bersifat relative. Maka, Islam yang dilihat dari sudut pengembangan iptek adalah sesuatu yang masih dalam proses, artinya masih terus menerus dicari dan dikembangkan. belajar terus tanpa henti untuk mencari dan menemukan Islam.

Untuk itu, Mastuhu mengenakan istilah ‘islami’ dengan pengertian sifat yang melekat dan pernah terbukti dalam sejarah atau tradisi keilmuan yang pernah dimiliki kebudayaan Islam. Sebab, menurut catatan sejarah, filsafat dan iptek keduanya dilahirkan dan dikembangkan pertama kali oleh bangsa Yunani dengan mendasarkannya kepada hokum alam (*natural law*). Mereka mengukuhkan bahwa kebenaran mutlak hanya ada di alam *idea*; sedangkan yang ada di dunia ini hanyalah *bayangan* dari kebenaran alam idea itu. Oleh karena itu, sifatnya relatif. Para ahli Yunani sejak ribuan tahun sebelum Muhammad Saw, lahir di dunia ini, sudah mengingatkan pada seluruh ilmuwan bahwa ada ‘orde’ yang tidak mungkin dilampaui oleh manusia dan oleh siapa pun, yakni *orde lama*. Karena bangsa Yunani tidak mngenal agama samawi, maka filsafat dan iptek yang dikembangkannya adalah ‘sekuler’.

Kemudian oleh orang Islam, sekitar abad ke 8-9 M, filsafat dan iptek Yunani tersebut ‘diislamkan’, dengan mengganti *natural law* dengan *sunnatullah*, yakni hukum alam ciptaan Allah, dan kebenaran di *alam idea* menjadi ‘kebenaran Tuhan’, maksudnya kebenaran mutlak yang *haq* itu hanya pada Allah. Sedangkan kebenaran duniawi adalah kebenaran relative yang harus secara terus menerus dikembangkan berdasarkan perspektif kebenaran Tuhan. Dengan demikian, dalam pemahaman nalar islami, pengembangan filsadat dan iptek tetap menggunakan

metodologi keilmuan yang secara *intrinstik* menjadi tuntutan universal. Ia disadari, diarahkan dan dijiwai oleh nilai etik moral Islami, sehingga keduanya akan tetap berkembang dalam perspektif ajaran Islam.<sup>6</sup>

Adapun pengembangan filsafat dan iptek di tangan orang Islam mencapai puncak keemasan pada abad 8-13 M. pada masa itu, pendidikan Islam atau tepatnya kebudayaan Islam mampu memimpin kehidupan, dimana manusia berdaya secara maksimal untuk mengendalikan ciptaannya sehingga kehidupan benar-benar aman, nyaman dan sekaligus maju serta dinamis. Rahasia kesuksesannya terletak pada kebebasan mimbar akademik, demokrasi, berpegang teguh pada etika akademik dan estetika. Dalam pandangan Islam, antara kebenaran ilmiah, etika, estetika dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mereka hanya dapat dibedakan menurut posisi dan peran atau fungsi masing-masing. Dalam pandangan Islam, ilmu sudah terkandung secara esensial dalam Alquran. Oleh karena itu, berilmu berarti beragama dan beragama berarti berilmu. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas dinilai atau dikritik. Menilai dan menggugat kembali keabsahan dan kebenaran suatu pendapat adalah diharuskan tanpa menilai yang berpendapat. Bahkan ilmuwan dengan senang hati melemparkan pendapatnya untuk dinilai dan bukan untuk dipertahankan, karena yang dicari adalah kebenaran dan bukan pembenaran.

Tetapi justru begitu kuatnya nilai-nilai kebenaran ilmiah yang dilontarkan oleh para ilmuwan Muslim pada zaman keemasan itu, sampai-sampai pendapat

---

<sup>6</sup> . Mastuhu, hal. 4

ilmiah tersebut berubah menjadi "mitos baru" yang hanya dipahami dan dihapalkan serta diamalkan. Para pengikut merasa tidak perlu menanyakan keabsahan kebenarannya dan juga tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya elaborasi, provokatif dan antisipatif : apa perubahan yang akan terjadi jika sekiranya sesuatu yang baru muncul. Para pengikut cenderung membiarkan perbedaan-perbedaan aliran yang ada. Mereka hanya mengambil pendapat tanpa mengkritik dan menganalisisnya. Sebab, sikap semacam itu diidentikkan sebagai sikap yang tidak menghargai guru. Padahal justru karena sikap yang demikian itu membiarkan ilmu menjadi mandeg.

Sesudah abad ke-13, sejarah peradaban Islam memasuki periode 'kejumudan' dimana ijtihad telah tertutup atau menurut istilah Harun Nasution bukan ijtihad yang telah tertutup, tetapi karena tidak ada yang berani berijtihad. Nalar Islam dalam zaman kebekuan ini ternyata lebih banyak bersifat apologetic dan mencari pembenaran. Sebaliknya, orang-orang Barat mempelajari ilmu-ilmu yang dikembangkan sarjana-sarjana Muslim dari zaman keemasan dan dikombinasikan dengan ilmu-ilmu Yunani kuno, kemudian dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang *elaborious*, *provitif* dan *antisipatif* serta *merasa bebas*. Akibatnya, pemegang estafet dinamika ilmu berpindah ke Barat.

Perkembangan iptek yang sekularistis inilah yang kemudian melanda seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia dan negara-negara Muslim lain, terutama dalam menghadapi persoalan pembangunan. Pemanfaatan Iptek yang sekuler ini, selain membawa dampak positif dalam memodernkan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa kerusakan lingkungan dan

dekadensi moral. Seluruh dunia 'menjerit' dan berupaya dengan keras untuk mencari integritas iptek dan agama.<sup>7</sup>

Dunia modern dalam menghadapi iptek sekuleristik ini bagaikan 'minum air laut'; semakin diminum akan semakin haus, bertambah manfaat positif yang diperoleh, bertambah pula dampak negatif yang harus diterima. Pandangan Barat rasanya sulit untuk menampilkan sisi harmonis antara kedua variabel itu. Bahkan menurut Syed Naquib Al-Attas, Barat tidak akan mampu menjembatani dikotomi tersebut, karena Barat telah berkembang terlalu jauh di atas perpaduan berbagai nilai kebudayaan Yunani, Romawi Kuno, Yudaisme, Agama Kristen, Germanik, Keltik dan Nordik yang masing-masing mewakili nilai dapat ditemukan satu landasan yang sama.

Meskipun telah berusaha bangkit kembali menemukan 'barang yang lepas', dan hal ini amat terasa sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20, umat Islam harus tetap kerja keras untuk mengejar ketinggalan, apalagi era yang dihadapi saat ini telah memasuki zaman postmodern. Rasanya mereka akan tetap ketinggalan jika terus berfikir reaktif dan bukan pro-aktif atau responsif untuk menguasai kembali iptek berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari sejarah pendidikan Islam, pernah muncul beberapa nama yang berusaha keras untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan itu pada awal abad 20, antara lain:

---

<sup>7</sup>Ibid, h. 9.

<sup>8</sup>Ibid, h. 11.

1. Sir Sayyid Ahmad Khan, dengan mendirikan AMU (*Aligarh Muslim University*). Dalam upaya menghancurkan dikotomi ini, ia mencontoh sistem sekolah di dunia Barat dengan memasukkan pelajaran bahasa Inggris dan filsafat Barat ke dalam sekolah-sekolah Muslim. Sistem ini berhasil di kalangan mereka. Seusai sekolah, mereka umumnya memasuki lapangan-lapangan kerja, di mana kemampuan bahasa Inggris dan nalar filsafat Barat disyaratkan oleh pemerintah kolonial Inggris saat itu. Namun segera mendapat tantangan keras dari komunitas Muslim-kolot yang menganggap sekolah itu sebagai lembaga yang berusaha mendangkalkan agama. Tetapi AMU sampai kini tetap berdiri tegak.
2. Maulana Abu Nasr Wahid dari Bengal. Ia mewajibkan siswanya mempelajari Bahasa Arab, pengetahuan Agama, bahasa Inggris, al-jabar dan geometri. Para siswa mengambil ujian yang sama dengan rekan-rekannya untuk memasuki universitas umum (modern). Dalam perkembangan lebih lanjut ternyata masih saja terasa adanya perbedaan antara rumpun ilmu "agama" dan ilmu "sekuler". Keduanya belum menyatu dan masih berdiri sendiri-sendiri; lama-lama perbedaannya makin mencolok dan oleh karena itu dualisme sistem pendidikan tetap berlaku.
3. Ahmad Al-Beely dari fakultas Syari'ah Universitas Riyadh Saudi Arabia. Resepnya adalah: anak-anak Muslim perlu mengambil ilmu-ilmu modern dan keagamaan. Namun demikian, mereka harus mempunyai landasan pendidikan agama yang sama dan kuat. Untuk itu, kegiatan pendidikan harus dimulai sejak kecil (di dalam keluarga), seperti shalat, membaca Al-Quran, Tafsir,

Hadits, Bahasa Arab, dan latihan-latihan intensif untuk mengamalkannya. Kemudian dalam masa sebelum masuk universitas, mereka mempelajari matematika, fisika, geografi, sejarah umum manusia dan bahasa asing sampai mampu memahami bacaan. Dengan begitu, bagi mereka yang akan mengambil spesialisasi ilmu-ilmu modern telah memiliki landasan agama yang kokoh, mengerti bahasa Arab, ilmu agama, dan tradisi mengamalkannya. Sebaliknya, mereka yang akan mengambil spesialisasi ilmu-ilmu keagamaan akan mampu menjelaskan ajaran agama dengan bahasa dan logika modern.

Diskursus seputar Islamisasi ilmu telah begitu lama menebarkan perdebatan penuh *kontroversi* di kalangan umat Islam. Semenjak dicanangkannya sekitar 40 tahun yang lalu, berbagai sikap baik yang pro maupun yang kontra terus bermunculan. Satu pihak dengan penuh antusias dan optimisme menyambut momentum ini sebagai awal *revivalisme* (kebangkitan) Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa Sejak terjadinya pencerahan di Eropa, perkembangan ilmu-ilmu *rasional* dalam semua bidang kajian sangat pesat dan hampir keseluruhannya dipelopori oleh ahli sains dan cendekiawan Barat. Akibatnya, ilmu yang berkembang dibentuk dari acuan pemikiran falsafah Barat yang dipengaruhi oleh *sekularisme*, *utilitarianisme*, dan *materialisme*. Sehingga konsep, penafsiran, dan makna ilmu itu sendiri tidak bisa terhindar dari pengaruh pemikiran tersebut. Namun di pihak lain menganggap bahwa gerakan "Islamisasi Ilmu" hanya sebuah *euphoria* sesaat untuk mengobati "sakit hati" (*inferiority complex*), karena ketertinggalan mereka yang sangat jauh dari peradaban Barat, sehingga gerakan ini hanya membuang-buang waktu dan tenaga dan akan semakin melemah seiring



perjalanan waktu dengan sendirinya. Tulisan ini mencoba merekam berbagai perkembangan seputar Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang menurut penulis bukan saja bisa dilakukan, akan tetapi sebuah kewajiban agama yang harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Karena Allâh menekankan lewat wahyunya bahwa Dia adalah sumber dan asal ilmu manusia (QS: al-‘Âlâq: 1-5).

Revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial politik di Perancis pada paruh kedua abad ke-18 yang merupakan titik awal pencerahan (*renaissance*) di Eropa menuju peradaban modern mengantarkan Barat mencapai sukses luar biasa dalam pengembangan teknologi masa depan. Sedangkan Umat Islam malah mengalami kemunduran-kemunduran sistemik dalam alur peradabannya. Praktis, menurut Nurcholish Madjid, dunia Islam dewasa ini merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang di antara penganut-penganut agama besar di dunia.<sup>9</sup> dikarenakan begitu rendahnya kemajuan yang diraih dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam hanya menjadi penonton bahkan “*terbuai*” oleh kenikmatan semu yang disuguhkan oleh Barat dengan kecanggihan teknologinya.

Sejak terjadinya pencerahan di Eropa, perkembangan ilmu-ilmu rasional dalam semua bidang kajian sangat pesat dan hampir keseluruhannya dipelopori oleh ahli sains dan cendikiawan Barat. Akibatnya, ilmu yang berkembang dibentuk dari acuan pemikiran falsafah Barat yang dipengaruhi oleh *sekularisme*, *utilitarianisme*, dan *materialisme*. Sehingga konsep, penafsiran, dan makna ilmu

---

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 21.

itu sendiri tidak bisa terhindar dari pengaruh pemikirannya.<sup>10</sup> Konsep pemikiran demikian dikonsumsi oleh umat Islâm sebagai umat yang kalah yang mulai tergantung kepada Barat. Mereka mempelajari sains Barat tanpa menyadari kaitan tali-temali historis Barat dan ilmu-ilmu Barat, sehingga umat Islam pun terjatuh dalam hegemoni Barat (*imperialisme cultural*) dan proses ini mengakibatkan esensi peradaban Islam semakin tidak berdaya di tengah kemajuan peradaban Barat yang sekuler.

Demi menjaga identitas keislaman dalam persaingan budaya global, para ilmuwan muslim bersikap defensif dengan mengambil posisi konservatif-statis, yakni dengan melarang segala bentuk inovasi dan mengedepankan ketaatan fanatik terhadap *syariah* (fiqh produk abad pertengahan) yang dianggap telah final. Mereka melupakan sumber kreatifitas, yakni ijtihad, bahkan mencanangkan ketertutupannya.

Hilangnya aspek kesakralan dari konsep ilmu Barat serta sikap keilmuan muslim yang menyebabkan terjadinya stagnasi setelah memisahkan wahyu dari akal, dan memisahkan pemikiran dari aksi dan kultur dipandang sama berbahayanya bagi perkembangan keilmuan Islam. Karena itu, muncullah sebuah gagasan untuk mempertemukan kelebihan-kelebihan di antara keduanya, sehingga

---

<sup>10</sup> Rosnani Hashim, *Gagasan Islamisasi Kontemporer: Sejarah Perkembangan dan Arah Tujuan*, dalam *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam* (INSIST: Jakarta, Thn II No.6/Juli-September 2005), hal. 29.

lahir keilmuan baru yang modern tetapi tetap bersifat religius dan bernafaskan tauhid, gagasan ini kemudian dikenal dengan istilah *Islâmisasi Ilmu*.

Ketika mendengar istilah Islamisasi Ilmu, ada sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam sehingga perlu untuk diislamkan. Dan untuk mengislamkannya maka diberikanlah kepada ilmu-ilmu tersebut dengan label "Islam" sehingga kemudian muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang yang ceroboh menganggap Islamisasi sebagai suatu proses yang berkaitan dengan objek-objek eksternal, kemudiannya mengaitkannya dengan komputer, kereta api, mobil bahkan bom Islam. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, ada yang terbelengu oleh pandangan dualistis, memberikan perhatian yang sedikit sekali pada pengembangan yang telah dilakukan oleh para cendekiawan dan pemikir muslim, mereka lebih tertarik melakukan pengembangan institusi-institusi, seolah-olah institusi-institusi tersebut dapat didirikan dengan baik tanpa para cendekiawan dan pemikir yang mumpuni di dalamnya.

Berbagai reverensi yang telah penulis telusuri menyangkut dengan Islamisasi Ilmu menemukan beberapa versi. *Versi pertama* beranggapan bahwa Islamisasi ilmu merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada (*ayatisasi*). *Versi kedua*, mengatakan bahwa Islamisasi Ilmu dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. *Ketiga*, Islamisasi Ilmu yang berdasarkan filsafat Islam dengan mempelajari dasar metodologinya. Dan *keempat*, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu yang

beretika atau beradab.<sup>11</sup> Dengan berbagai pandangan dan pemaknaan yang muncul secara beragam ini perlu kiranya untuk diungkap dan agar lebih dipahami apa yang dimaksud Islamisasi Ilmu. Pengertian Islamisasi ilmu ini secara jelas diterangkan oleh al-Attâs, yaitu: “Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) dan dari belengu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi”.<sup>12</sup> Ini artinya dengan Islamisasi ilmu, umat Islam akan terbebaskan dari belengu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai dengan fitrahnya.

Untuk melakukan Islamisasi ilmu tersebut, seperti halnya yang telah disebutkan Mastuhu di pada bab sebelumnya, menurut Mastuhu, perlu memahami langkah –langkah tersebut, *pertama* perlu memahami konsep pendidikan sekuler itu tidak sepenuhnya tidak cocok dengan ajaran Islam, terdapat unsur-unsur

---

<sup>11</sup> Ummi, *Islamisasi Sains Perspektif UIN Malang*, dalam Inovasi: Majalah Mahasiswa UIN Malang, Edisi XXII, Tahun. 2005, hal. 25.

<sup>12</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy dkk, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998), hal., 336.

kebenaran yang terkandung didalamnya, terutama yang berkenaan dengan iptek yang dapat diterima oleh Islam. *Kedua*, Islam harus tetap menghormati dan menerima konsep pendidikan tradisional yang sudah mengakar atau mentradisi dalam kehidupan umat Islam. Namun demikian harus disadari adanya hal-hal yang perlu ditinggalkan karena sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, atau dengan kata lain perlu ada prinsip : "*memelihara hal-hal yang baik yang telah ada sambil mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik*". *Ketiga*, Pendidikan Islam harus dimulai dari hal-hal dini atau kebiasaan-kebiasaan positif, dari pola pendidikan tradisional dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan pemikiran anak didik, dan dengan menggunakan konsep pendidikan modern setelah 'meng-Islam-kannya' terlebih dahulu dan bagian-bagian tertentu, sehingga perkembangannya benar dan sesuai dengan ajaran Islam;<sup>13</sup> *Meng-islam-kan* disini sejalan dengan yang diinginkan oleh Al-Attas, yaitu dengan melibatkan dua proses yang saling berhubungan. *Pertama* melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, dan *kedua*, memasukan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan modern yang relevan.<sup>14</sup>

Dengan adanya konsep atau teori tersebut, diharapkan ilmu yang berkembang tidak terlepas dari aturan yang ada dalam Islam, karena pada dasarnya Islam merupakan pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat

---

<sup>13</sup> Mastuhu, 18

<sup>14</sup> Daud, Wan Mohd Nor Wan, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy dkk, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas* Bandung: Mizan, 1998. hal. 336-337.

sehingga manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar-benar dapat membantu manusia mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki dan terlepas dari krisis yang dihadapi oleh masyarakat.

### ***B. Kontribusi Pemikiran Mastuhu terhadap Pendidikan Islam Masa Kini***

Pokok-pokok dalam pemikiran Pendidikan Islam Mastuhu yang dituangkan dalam buku-buku beliau cukup dapat menjadi acuan dasar dalam pengembangan dan pemikiran pendidikan Islam berikutnya. Dan hal ini terbukti dengan kemajuan-kemajuan yang telah terjadi dalam Pendidikan Islam masa kini, diantaranya ialah:

#### *a. Pembaruan Sistem Pendidikan Madrasah*

Menurut Muhaimin, kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh empat hal. *Pertama*, realisasi dari pembaharuan pendidikan Islam. *Kedua*, penyempurnaan sistem pendidikan pesantren agar memperoleh kesempatan yang sama dengan pendidikan sekolah umum. *Ketiga*, keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat. *Keempat*, upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.<sup>15</sup>

Namun, realitas pendidikan di madrasah saat ini bisa dibilang telah mengalami masa *intellectual deadlock*.<sup>16</sup> Sehingga gagasan Mastuhu mengenai

---

<sup>15</sup>Muhaimin & Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 305.

<sup>16</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi*, ed. Imam Machali dan Musthofa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), h. 8.

pembaharuan Sistem Pendidikan Madrasah masih relevan jika diterapkan dalam kondisi madrasah saat ini.

Hal ini dilandasi dengan adanya indikasi diantaranya adalah; *pertama*, minimnya upaya pembaharuan, dan kalah cepat dengan perubahan sosial, politik dan kemajuan iptek. *Kedua*, praktek pendidikan Islam sejauh ini masih memelihara warisan yang lama dan tidak banyak melakukan pemikiran kreatif, inovatif dan kritis terhadap isu-isu aktual. *Ketiga*, model pembelajaran pendidikan Islam terlalu menekankan pada pendekatan intelektualisme-verbalistik dan menegaskan pentingnya interaksi edukatif dan komunikasi humanistik antara guru-murid. *Keempat*, orientasi pendidikan Islam menitikberatkan pada pembentukan *abd* atau hamba Allah dan tidak seimbang dengan pencapaian karakter manusia muslim sebagai *khalifah fi al-ardl*.<sup>17</sup>

Madrasah merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang hidup di Indonesia. Ternyata madrasah menyimpan kelemahan di dalam kreativitasnya selama ini, mulai dari orientasi madrasah yang begitu sempit pada proses pencagaran untuk mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, ditambah lagi kurikulum madrasah yang pelaksanaannya serba setengah-setengah dan kebijakan di bidang kurikulum kurang dibarengi dengan kebijakan di bidang perangkat-perangkat pendukungnya, sehingga terdapat kesenjangan antara idealitas kurikulum dengan kemampuan perangkat operasionalnya

Selanjutnya metode pengajaran di madrasah cenderung lebih banyak digarap dari sisi didaktik metodiknya sehingga tenggelam dalam persoalan teknis-

---

<sup>17</sup>Ibid, h. 9.

mekanis, sementara persoalan yang lebih mendasar yang berhubungan dengan aspek “pedagogisnya” kurang banyak disentuh. Dan konsep manajemen madrasah dijalankan secara tradisional kurang mengarah kearah professional, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern tampaknya masih merupakan barang mewah, kecuali beberapa madrasah yang mendapatkan gelar “Madrasah Unggulan”. Oleh karena itu, komponen dasar pendidikan, yakni guru, filsafat dan metodologi pendidikan, dan perangkat keras, harus serempak diperbaharui dan dikembangkan. Sistem pendidikan guru –didaktis metodis- pun harus dibenahi.<sup>18</sup>

Disamping itu pula kelemahan sistem pendidikan madrasah pada dasarnya sama dengan kelemahan umum yang disandang oleh sistem pendidikan di Indonesia, yakni: mementingkan materi diatas metodologi, mementingkan memori di atas analisis dan dialog, mementingkan penguatan pada "otak kiri" di atas "otak kanan", materi pelajaran agama yang diberikan masih bersifat tradisional, belum menyentuh aspek rasional, penekanan yang berlebihan pada ilmu sebagai produk final, bukan pada proses metodologinya dan mementingkan orientasi 'memiliki' di atas 'menjadi'. Oleh karena itu, menurut Mastuhu, keberadaan pendidikan Madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun demikian, pendidikan ini akan mampu memberikan sumbangan yang berarti jika disertai dengan metodologi modern dan islami. Untuk itu diperlukan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman peserta didik.

---

<sup>18</sup>Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 242.



Oleh karena itu, madrasah harus melakukan pembaruan dalam dalam sistemnya sehingga terbentuk madrasah yang berkualitas dan bermutu. Guna mengatasi masalah tersebut, maka Mastuhu mengajukan beberapa usulan, diantaranya: *Pertama*, dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas. *Kedua*, kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan, termasuk yang bersifat dikotomis harus diubah dengan mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. *Ketiga*, metode pembelajaran diorientasikan pada upaya pemecahan kasus (problem solving)/ rasional dan bukan dominasi ceramah (tradisional). *Keempat*, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah tidak berdiri sendiri : di atas dan dibawahnya, di kanan dan dikirinya, ada substansi lain yang sangat menentukan keberhasilan misi pendidikan madrasah. Oleh karena itu, semuanya harus berada dalam dinamika sistem yang melengkapi satu sama lain.<sup>19</sup>

Jika hal itu telah dilakukan, maka lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah akan lebih mampu bersaing dengan mampu mempersiapkan dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, berkualitas dan berkaliber dunia dalam bidangnya sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman.

*b. Transformasi Pendidikan Pesantren.*

---

<sup>19</sup>Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 61.

Disamping pengamatan terhadap pemberdayaan Madrasah, ternyata Mastuhu juga sangat menyelami problema dan dinamika sistem pendidikan pesantren. Hal ini terlihat dari buku beliau yang berjudul *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, di tahun 1994 silam.

Adapun istilah ‘pesantren’ berasal dari kata santri yang mendapat prefix ‘pe’ dan sufiks ‘an’, sehingga menjadi ‘pesantren’ yang awal mula katanya ialah ‘pesantrian’ yang berarti tempat pemukiman para santri (orang yang belajar agama Islam) atau tempat berkumpul untuk belajar agama Islam.<sup>20</sup>

Pada awal berdirinya, bentuk pesantren masih sangat sederhana. Kegiatan pengajian diselenggarakan di masjid atau surau di bawah bimbingan seorang kyai atau ustadz terhadap para santri sebagai muridnya. Kyai biasanya merupakan seseorang yang sudah pernah mukim bertahun-tahun di Makkah atau Madinah. Atau pernah berguru pada seorang wali atau kyai terkenal di Nusantara, kemudian beliau mukim di suatu desa dengan mendirikan langgar yang dipergunakan untuk shalat jama’ah, sehingga keberadaan Pondok Pesantren terus berkembang sebagai pusat pendidikan Agama Islam atau aktivitas keagamaan lainnya.

Menurut Ahmad Maghfurin, terdapat 4 jenis model pesantren yang telah berkembang di Indonesia, antara lain:

1. Model 1: Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas asli sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (keagamaan bersumber dari kitab kuning).

---

<sup>20</sup>Zamakhsyari Djofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994) h. 18.

2. Model 2: Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, namun dengan kurikulum yang disusun sendiri, tidak mengikuti pemerintah nasional sehingga ijazahnya bukan ijazah formal.
3. Model 3: Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya baik berbentuk madrasah maupun sekolah dalam berbagai jenjang bahkan sampai perguruan tinggi.
4. Model 4: Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam dimana para santrinya belajar di sekolah atau perguruan tinggi di luar pesantren.<sup>21</sup>

Sedangkan istilah ‘pembaruan’ berakar dari kata ‘baru’ dan dalam bahasa Arab di terjemahkan dengan ‘tajdid’. Istilah tajdid menurut Cowan dapat diindonesiakan menjadi *renewal* (pembaharuan), *innovation* (inovasi, perubahan), *reorganization* (mengorganisasikan kembali) , *reform* (membentuk, menyusun kembali) dan *modernization* (modernisasi)<sup>22</sup>. Dan inti dari keseluruhan istilah di atas adalah terciptanya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kata pembaruan di atas memiliki kemungkinan untuk diimplementasikan dalam berbagai komponen pendidikan, seperti tujuan, kelembagaan, keorganisasian, kurikulum, metodologi dan tenaga pengajarnya.

Dari perspektif kesejarahan dan pendidikan, dunia pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tradisional yang tahan terhadap gelombang

---

<sup>21</sup> Ahmad Maghfurin, Pesantren: Model Pendidikan Islam Masa Depan, dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 149-150.

<sup>22</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), h.477.

modernisasi.<sup>23</sup> Oleh karena itu, arus modernisasi sistem pendidikan di Indonesia pada awalnya tidak dikumandangkan oleh kalangan muslim. Sistem pendidikan modern pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan mendirikan *volkschoolen* (sekolah rakyat atau sekolah desa)<sup>24</sup> dan telah memberi pengaruh terhadap pendidikan di pesantren. Corak dikotomi sistem pendidikan Belanda terlihat pada kebijakan yang memisahkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pendidikan agama diselenggarakan di lembaga pesantren yang dikelola oleh umat Islam sedangkan pendidikan umum dikelola oleh pemerintah Belanda.<sup>25</sup>

Sepanjang sejarah, pesantren terus menghadapi arus gelombang modernitas.<sup>26</sup> Sejak dilancarkannya modernisasi pendidikan Islam di kawasan masyarakat Islam, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti halnya pesantren yang dapat bertahan. Banyak pesantren mengalami krisis kepercayaan di masyarakat karena dianggap tidak mampu menyuguhkan dunia kerja praktis yang dibutuhkan oleh dunia industri. Pesantren kebanyakan lenyap setelah tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum atau mengalami

---

<sup>23</sup>Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h, 157.

<sup>24</sup>Ibid, h. 159

<sup>25</sup>Abuddin Nata, “*pendidikan Islam di Indonesia : Tantangan dan Peluang*”, dalam pengukuhan Guru Besar 20 Maret 2004, h. 32.

<sup>26</sup>M. Darwan Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 1

transformasi menjadi lembaga umum, atau menyesuaikan diri dan mengadopsi isi dan metodologi pendidikan umum.<sup>27</sup>

Berhadapan dengan globalisasi dan ancaman kuatnya benturan peradaban tersebut, maka tak mungkin pesantren masih bertahan dengan pola pembelajaran lama. Adapun menurut Mastuhu, pembelajaran yang lama tersebut menimbulkan unsur-unsur berikut: *Pertama*, dunia pesantren memandang bahwa ilmu adalah hal yang sudah final dan mapan, serta dapat diperoleh melalui konsep berkah kiai.

*Kedua*, para santri yang ada di pesantren melihat bahwa ilmu atau apa saja yang diajarkan oleh kiai, ustadz dan kitab-kitab agama harus diterima sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pandangan yang demikian pada gilirannya membawa kepada keadaan di mana kiai kurang kritis.

*Ketiga*, dunia pesantren memandang bahwa kehidupan ukhrawi jauh lebih penting daripada kehidupan duniawi. Akibatnya mereka kurang memperhatikan hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan kesuksesan hidup di dunia. Ilmu pengetahuan, teknologi modern dan etos kerja yang progresif kurang mendapat tempat di lingkungan pesantren.

*Keempat*, dunia pesantren masih cenderung menerapkan metode belajar dengan sistem hafalan, tanpa disertai dengan pengembangan wawasan, penalaran dan kemampuan berfikir sistematis dan kritis. Akibatnya mereka hanya menjadi konsumen ilmu yang terkadang kurang relevan dengan zaman, dan tidak berani tampil sebagai produsen ilmu.

---

<sup>27</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 95.

*Kelima*, adanya keharusan patuh dan tunduk secara mutlak kepada guru serta pada kehidupan kolektif, menyebabkan terjadinya hambatan bagi perkembangan individualitas (jati diri) dan menghambat timbulnya berpikir kritis.

*Keenam*, adanya pandangan hidup fatalistis yang menyerahkan nasib kepada keadaan dan perilaku sakral dalam menghadapi berbagai relitas kehidupan keduniaan sehari-hari, menyebabkan para santri tidak memiliki etos kerja dinamis dan progresif yang diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global.<sup>28</sup>

Berdasarkan pada analisis terhadap nilai-nilai positif dan negative tersebut di atas, Mastuhu sampai kepada pengajuan saran-saran sebagai berikut:

*Pertama*, pesantren harus melakukan pengembangan dan pembaruan terhadap pemikiran dalam memahami ajaran Islam, antara lain dengan mengembangkan teologi yang bercorak rasional melalui pengajaran filsafat dan penerapan metode dialog.

*Kedua*, pesantren perlu mengadopsi dan mengembangkan wawasan berfikir keilmuan dari Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dengan menerapkan metode berfikir: a) deduktif, b) induktif, c) kausalitas, dan d) kritis. Hal ini amat penting, artinya jika kita ingin memanfaatkan pesantren sebagai sarana kelembagaan penyuluhan pembangunan nasional secara efektif dan efisien, untuk menyempurnakan pendekatan melalui bahasa agama sebagaimana selama ini digunakan oleh pesantren di dalam mengajak umat Islam melaksanakan kewajiban sosial keagamaannya.

---

<sup>28</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. (Jakarta: INIS, 1994)

*Ketiga*, pesantren perlu mengembangkan konsep atau wawasan baru mengenai asrama sebagai salah satu ciri khasnya yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga mampu mengembangkan ilmu-ilmu yang diasuhnya.

*Keempat*, pesantren perlu menjadikan dirinya sebagai pusat studi pembaruan tarekat.

*Kelima*, perlu adanya kelompok ahli yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya untuk membantu pesantren di dalam mengembangkan wawasan berfikir rasional dan ilmiah.<sup>29</sup>

Dari gagasan-gagasan yang telah di utarakan Mastuhu, ternyata untuk pesantren dewasa ini cukup memberi sumbangan yang besar demi kemajuan pondok pesantren itu sendiri. Khususnya tentang pesantren perlu mengadopsi dan mengembangkan wawasan berfikir keilmuan dari Sistem Pendidikan Nasional, Hal ini ditunjukkan dalam populasi pondok pesantren ini semakin bertambah dari tahun ke tahun, baik pondok pesantren tipe salafiyah maupun khalafiyah yang kini tersebar di penjuru tanah air. Pesatnya pertumbuhan pesantren ini akan sekan mendorong pemerintah untuk melembagakannya secara khusus. Sehingga keluarlah surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2001.

Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, maka pendidikan pesantren dewasa ini telah mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah terutama

---

<sup>29</sup> Ibid.161.

Kementerian Agama. Saat ini telah menjadi direktorat tersendiri yaitu direktorat pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pondok pesantren secara optimal terhadap masyarakat. Data yang diperoleh dari kantor Dinas Pendidikan, Departemen Agama serta Pemerintahan Daerah, sebagian besar anak putus sekolah, tamatan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun mereka tersebar di pondok pesantren dalam jumlah yang relatif banyak. Kondisi pondok pesantren yang demikian akhirnya direspon oleh pemerintah. Sehingga lahirlah kesepakatan bersama antara departemen Agama dan departemen Pendidikan dengan nomor 1/U/KB/2000 dan MA/86/2000 tentang pedoman pelaksanaan pondok pesantren salafiyah sebagai pola pendidikan dasar.

Secara eskplisit, untuk operasionalnya, setahun kemudian keluar surat keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam, nomor E/239/2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah. Lahirnya UU nomor 02 tahun 1989, yang disempurnakan menjadi UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 4 disebutkan pendidikan keagamaan, pondok pesantren termasuk bagian dari sistem pendidikan nasional. Merupakan dokumen yang amat penting untuk menentukan arah dan kebijakan dalam penanganan pendidikan pada pondok pesantren di masa yang akan datang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup><http://makalahmajannai.blogspot.com/2012/04/pesantren-dinamika-dan-perkembangan.html>(15 Januari 2013)



Disamping itu, aspek metode yang diajukan Mastuhu pun terlihat menunjukkan bahwa secara perlahan-lahan, telah ada benih-benih upaya untuk menyampaikan pelajaran secara modern sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah sekuler. Hal ini terbukti karena dalam kenyataannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad, beberapa metodologi pendidikan di pesantren mendapat beberapa kritik. Praktek hafalan di pesantren hampir meniadakan aspek-aspek pemahaman kognitif-rasional dan pengembangan wawasan. Sehingga diperlukan adanya perimbangan (balancing) antara aspek afektif (hafalan) dan kognitif (pemahaman rasional) dalam proses pengajaran kitab kuning.<sup>31</sup>

Kondisi lain adalah hilangnya keberanian untuk berbeda pendapat. Keadaan ini akibat metode pendidikan di pesantren kurang memberikan ruang dialog karena sistem yang hanya berpusat kepada kyai semata. Disamping itu pula kreativitas santri pun tidak berkembang dengan baik, karena adanya rasa segan bahkan takut bertanya dan berbeda pendapat dianggap sebagai *su'ul 'adab*. Kondisi ini lah yang menurut Mastuhu akhirnya mengakibatkan santri memandang ilmu sebagai hal sudah final dan mapan dan tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Inilah yang menyebabkan metode-metode pembelajaran di pesantren seperti sorogan, bandongan, dan halaqah tidak beranjak dari orientasi *content knowledge* belum mengarah pada *understanding* dan *contruction of knowledge*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Husein Muhammad, *Kontekstualisasi Kitab Kuning :Tradisi Kajian dan Metodologi Pengajaran*,(tt.) h. 282.

<sup>32</sup>Abdul Mukti, *Paradigma Pendidikan Pesantren: Ikhtiar Metodologis Menuju Minimalisasi Kekerasan Politik*, dalam Islami SM, Nurul Huda dan Abdul Khaliq (Eds), *Dinamika*

Disamping itu pula, sekarang banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum di lingkungannya. Sehingga, yang pada mulanya kiai merupakan fungsionaris tunggal, kini diperlukan sejumlah guru-guru untuk mengajarkan berbagai macam jenis pelajaran baru yang tidak semuanya dikuasai oleh kiai. Sehingga peran guru menjadi penting karena kemampuan yang dimilikinya dari pendidikan diluar pesantren. Dan sejak saat itu kiai tidak menjadi fungsionaris tunggal dalam pesantren. Mengikuti perkembangan zaman, beberapa pesantren mulai memasukkan pelajaran keterampilan sebagai salah satu materi yang diajarkan. Ada keterampilan berternak, bercocok tanam, menjahit berdagang dan lain sebagainya. Disisi lain ada juga pesantren yang cenderung mengimbangi dengan pengetahuan umum. Seperti tercermin dalam madrasah yang disebut dengan “modern” dengan menghapuskan pola pembelajaran watonan, sorogan dan pembacaan kitab-kitab tradisional. Dengan mengadopsi kurikulum modern, pesantren yang terakhir ini lebih mengutamakan penguasaan aspek bahasa.

Untuk itu, pesantren di samping dapat mencetak para ulama/kyai, juga akan mampu melahirkan santri yang ahli dalam bidang iptek, seperti ahli komputer, fisika, pertanian, perkebunan dan lain-lain, yaitu agar terciptanya integrasi ilmu-ilmu yang bersumber pada ayat-*qur’aniyyah (ilmu agama)* dan ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat *kauniyah (ilmu-ilmu umum)*.

Gagasan-gagasan yang diutarakan oleh Mastuhu tersebut memperlihatkan bahwa Mastuhu menggunakan kerangka berfikir modern. Pesantren menurut Mastuhu masih bertumpu pada corak pemikiran tradisional dan kurang sejalan

---

*Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta : Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 136.

dengan tuntutan masyarakat modern, sehingga menurut Mastuhu corak berfikir yang demikian itu harus diganti dengan corak berfikir modern. Dan hal ini beliau lakukan sebagai bentuk keprihatinan atas keterbelakangan umat Islam yang diantaranya disebabkan oleh keterbelakangan dalam berfikir dan etos sebagaimana yang diajarkan dunia pesantren. Sehubungan dengan itu, maka jika ingin mengubah mental masyarakat Islam, maka menurut Mastuhu salah satu caranya dengan mengubah pola dan sistem pendidikan yang terdapat di pesantren.<sup>33</sup>

### *c. Kedudukan Madrasah dan Sekolah Umum mulai disejajarkan*

Bersamaan dengan berkembangnya pendidikan agama di sekolah umum, perhatian pemerintah terhadap madrasah atau pendidikan Islam terjadi sejak Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengeluarkan maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945. Isinya menganjurkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran, agar pengajaran di langgar, surau, mesjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan.<sup>34</sup>

Pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat tersebut, BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan material dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dalam mencerdaskan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

---

<sup>33</sup>Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 287

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.62

Namun perhatian pemerintah yang begitu besar di awal kemerdekaan ini nampaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama (UU No. 4 tahun 1950 jo. UU No.12 tahun 1954) diundangkan, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah umum. Dampaknya, madrasah dan pesantren dianggap berada diluar sistem. Oleh karena itu, mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama.

Reaksi terhadap sikap pemerintah yang diskriminatif ini menjadi lebih keras dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No.15 tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan oleh umat Islam.<sup>35</sup>

Pada periode H.A. Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI.), ia menawarkan konsep alternatif mengembangkan madrasah melalui kebijakan SKB Tiga Menteri, yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah, dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Dilihat dari isu sentralnya, H.A. Mukti Ali ingin mendobrak persepsi masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana selalu didudukkan dalam posisi marginal,

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam ...*h.63

karena hanya berkuat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, sehingga output-nya pun kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Persepsi tersebut tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme yang menganaktirikan dan bersikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam (madrasah).

Pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri), yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang *Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*. SKB Tiga Menteri ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dengan munculnya SKB Tiga Menteri, rupanya masyarakat mulai memahami eksistensi madrasah tersebut dalam konteks pendidikan nasional.

Sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1 ayat (2) dinyatakan: madrasah itu meliputi tiga tingkatan: (1) Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar, (2) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (3) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya di dalam bab II pasal 2 dinyatakan, bahwa: (1) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat

lebih atas; dan (3) Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>36</sup>

Dengan SKB Tiga Menteri, Departemen agama melakukan usaha pemantapan struktur madrasah secara lebih menyeluruh. Sejumlah Keputusan dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja madrasah pada semua tingkatan. Departemen Agama juga mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri.<sup>37</sup> Dalam hal kurikulum dilakukan penyusunan ulang dengan menyempurnakan komposisi mata pelajaran-mata pelajaran umum. Sejalan dengan SKB Tiga Menteri itu, kurikulum madrasah memuat mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Dengan demikian, madrasah dapat dikatakan sebagai sekolah plus pendidikan agama.

Penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan langkah yang dianggap paling esensial dalam merealisasikan SKB Tiga Menteri. Persamaan status madrasah dengan sekolah tidak hanya tampak dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang mengakomodasikan secara penuh kurikulum sekolah.

Pengakuan terhadap status madrasah, yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem sekolah telah membuahkan tanggapan yang menggembirakan. Di antaranya, diperoleh Inpres untuk 1.000 madrasah pada

---

<sup>36</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.150-151

<sup>37</sup> Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, *Buku Pedoman Guru Madrasah*, (Jakarta 1978/1979), h.1

tahun 1978 dan beberapa tahun kemudian datang permintaan dari rektor IPB, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution untuk mengirimkan beberapa lulusan terbaik Madrasah Aliyah sebagai mahasiswa PMDK di IPB.<sup>38</sup>

Pada tahap awal setelah SKB, Departemen Agama menyusun kurikulum 1976, yang diberlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kemudian, kurikulum 1976 ini disempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana dinyatakan dalam SK Menteri Agama No.45 tahun 1987. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tingkat Ibtidaiyah, komposisi kurikulum 1984 terdiri dari 15 bidang studi. Bidang studi agama hanya mencakup sekitar 30% dengan lima mata pelajaran. Dua di antaranya baru diberikan mulai kelas tiga, yakni Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Selebihnya, sekitar 70% dengan 10 bidang studi, merupakan bidang studi umum yang diberikan sejak kelas satu hingga kelas enam.

Pada tingkat Tsanawiyah, komposisi kurikulum dibagi ke dalam tiga jenis pendidikan: (1) Pendidikan Dasar Umum, (2) Pendidikan Dasar Akademik, dan (3) Pendidikan Dasar Keterampilan. Dari 16 mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum itu, hanya terdapat lima mata pelajaran agama, yaitu: Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Tiga mata pelajaran yang pertama merupakan bagian dari tujuh mata pelajaran dalam jenis Pendidikan Dasar Umum. Sedang dua sisanya merupakan bagian dari delapan mata pelajaran dalam jenis Pendidikan Dasar Akademik.

---

<sup>38</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*,... h.153

Pada tingkat Aliyah, struktur kurikulum berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Sesuai dengan kurikulum nasional 1984, pendidikan pada tingkat Aliyah atau Menengah Atas, Umum terdiri dari lima pilihan jurusan: A1 (Ilmu-ilmu Agama), A2 (Ilmu-ilmu Fisika), A3 (Ilmu-ilmu Biologi), A4 (Ilmu-ilmu Sosial), dan A5 (Pengetahuan Budaya).<sup>39</sup>

Komponen kurikulum 1984 di tingkat Aliyah pada umumnya terbagi ke dalam dua program pilihan, yaitu Program Inti dan Program Pilihan. Termasuk ke dalam Program Inti adalah Pendidikan Agama yang mencakup lima mata pelajaran dan Pendidikan Dasar Umum yang terdiri dari 19 mata pelajaran. Program inti merupakan program pendidikan yang wajib diikuti oleh semua siswa dengan mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, kepentingan agama, tujuan masyarakat, serta penguasaan pengetahuan bagi semua siswa. Sedangkan dalam Program Pilihan hanya memuat pendidikan pengembangan yang kandungan atau mata pelajaran-mata pelajarannya berbeda antara satu jurusan dengan jurusan lainnya.<sup>40</sup>

SKB Tiga Menteri ini mempunyai manfaat bagi umat Islam, di antaranya adalah, *pertama*, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren). *Kedua*, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Meski demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB Tiga Menteri ini memang,

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Sekolah Umum Tingkat Atas (SMA), Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kurikulum*, (Jakarta: 1990), h.4

<sup>40</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.103



status madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Dengan SKB ini pula alumni MA dapat melanjutkan ke universitas umum dan sebaliknya alumni SMA dapat melanjutkan studinya ke IAIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, di mana komposisi kurikulum madrasah 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah, di sisi lain, bagaimanapun juga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

Kalangan masyarakat yang berbasis budaya santri (muslim yang taat) banyak memanfaatkan kesempatan pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Termasuk ke dalam bagian mereka adalah kalangan keluarga pimpinan dan aktivis politik Islam, khususnya dari kelompok modernis.

Perkembangan intelektual santri pada gilirannya turut mengubah formasi sosio-kultural kaum muslimin Indonesia, yang tidak lagi terpecah secara diametral antara kelompok modernis dan tradisional. Selama bertahun-tahun, wacana keislaman di Indonesia diwarnai oleh dikotomi itu, yang secara konkrit biasanya menghadapkan Muhammadiyah mewakili kelompok modernis, dan Nahdlatul Ulama mewakili kelompok tradisional. Melalui media pendidikan, interaksi intensif antar kedua kelompok itu berlangsung sehingga terjadi hubungan yang integratif dan kohesif. Sampai masa-masa akhir dekade 1960-an, pendidikan kalangan modernis tertumpu pada sekolah-sekolah sementara kalangan

tradisionalis berpusat pada madrasah dan pesantren.<sup>41</sup> Namun hal ini tidak lagi terjadi pada masa-masa berikutnya karena mobilisasi kaum muslimin di bidang pendidikan terarah pada sistem pendidikan yang tidak lagi dikotomis.

*d. Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran wajib*

Pada tahun 1966, tepatnya setelah meletusnya G.30 S.PKI pada tahun 1965, diadakan Sidang Umum MPRS yang menetapkan status pendidikan agama di sekolah-sekolah berubah dan bertambah kuat. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal 1 berbunyi: “Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-universitas Negeri”. Dalam penjelasan ketetapan MPRS tersebut disebutkan bahwa “semua agama yang diakui pemerintah diberi kesempatan yang sama, dan untuk toleransi dan atas dasar hak-hak asasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinannya”.<sup>42</sup>

Dengan adanya ketetapan ini maka tambahan kata-kata “... dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatan”, yang merupakan hasil perjuangan PKI, dihapuskan bersamaan dengan dilarangnya Partai Komunis di Indonesia.

Kemudian dalam pasal 4 Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 memuat tentang kebijakan dan isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah:

---

<sup>41</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1993), h.23-41

<sup>42</sup> Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.187

- 1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama,
- 2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan,
- 3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.<sup>43</sup>

Sejak ditetapkannya Tap MPRS XXVII/MPRS/1966 pendidikan agama dijadikan sebagai mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, dengan pengertian bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama ikut menentukan naik/ tidaknya seorang murid.

Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1973 jo. Tap MPR No.IV/MPR/1978 dan Tap MPR No.II/MPR/1983 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*, mengindikasikan bahwa pendidikan agama semakin dikokohkan kedudukannya dengan dimasukkannya dalam GBHN sebagai berikut: “Dusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”.<sup>44</sup>

*e. Transformasi IAIN ke UIN.*

Jika penulis mengaitkan dengan rencana perubahan IAIN menjadi UIN, maka kerja besar, biaya mahal, dukungan kuat dan kesiapan internal adalah hal mutlak yang harus dipikirkan dan digalang dengan sungguh-sungguh dan tak mengenal menyerah. Perumusan konsep tentang visi, misi, tradisi yang akan

---

<sup>43</sup> Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam ...*h.189

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.39

dibangun, penampilan (*performance*) fisik bangunan, kelembagaan, profil dosen, profil mahasiswa, profil lulusan yang diharapkan, sentra-sentra kegiatan yang akan dikembangkan, pengembangan dosen, pengembangan perpustakaan, hubungan kerjasama dengan pihak luar, hubungan civitas akademika secara internal dan eksternal adalah perangkat yang harus segera disiapkan. Sarana pendukung fisik yang sesuai dengan perkembangan terkini dan mampu menampung semua kebutuhan universitas adalah sisi lain yang harus diusahakan lebih maksimal lagi. Kelancaran birokrasi keuangan dan pelayanan juga hal penting yang mendesak untuk direformasi agar selaras dengan percepatan yang diagendakan.

Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum sudah waktunya untuk diakhiri. Naïf sekali, jika intelektual muslim hari ini masih juga terjebak pada pikiran kecil, parsial dan tidak komperhensif. Struktur keilmuan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta sejak awal berdirinya sampai saat terakhir masih berkutat pada konseptual belaka. Pola pikiran konseptual yang abstrak dan cenderung dalam bentuk doktrin ini tentu harus dapat dijabarkan sedemikian rupa. Payung Universitas (UIN) tentu akan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengembangkan keilmuan yang berbasis pada eksperimen, observasi dan pendekatan ilmiah lainnya. Ilmu pengetahuan yang berbasis pada al-qur'an dan sunnah itulah nantinya yang akan dikembangkan pada UIN. Secara lugas dapat dikatakan bahwa UIN dimaksudkan untuk mengabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan. UIN dipastikan akan menolak dikotomi atau

pemberian kategorisasi pada ilmu, sebagai ilmu umum dan ilmu agama. Sebab kategorisasi semacam itu adalah janggal dan rancu. Karena, Islam pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai ajaran yang bersifat khusus, sebab lingkup ajaran Islam luas, universal dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Masalah yang perlu ditegaskan adalah jika ilmu agama dan ilmu umum dikatakan sebagai ilmu, maka ilmu agama bersumber dari wahyu ilahi dan ilmu umum berasal dari observasi, eksperimen dan penalaran ilmiah manusia.

Kewajiban untuk mengintegrasikan (memadukan) ilmu agama dan ilmu umum dalam satu wadah universitas bukan saja sebagai upaya yang bersifat akademis tapi juga memiliki misi teologis. Kedua bidang ilmu yang berasal dari sumber yang berbeda (Allah dan Manusia) tentu harus dikaji secara bersama-sama dan simultan, mungkin yang harus ditegaskan adalah bahwa bidang ilmu agama itu bersifat *fardu ain* sedangkan pengetahuan umum itu *fardhu kifayah*. Bila dikaitkan dengan konversi IAIN menjadi UIN, kebijakan yang harus diwarnai sejak dini adalah siapapun yang akan menjadi pemimpin di Universitas Islam Negeri (UIN) harus memiliki komitmen yang jelas tentang keberpihakannya pada cabang-cabang ilmu agama yang sudah mapan pada Fakultas-Fakultas yang sudah ada. Proteksi yang kuat tentang keberadaan ilmu-ilmu agama sebagai ilmu yang *fardu ain* harus nyata dan tidak boleh jebol oleh kepentingan sesaat dan populis.

Sementara itu, berkenaan dengan ilmu-ilmu umum mahasiswa harus pula diberi peluang untuk memilih salah satu cabang disiplin ilmu yang diminatinya. Mahasiswa UIN sebagai kader bangsa diharapkan dapat menjadi penentu arah masa depan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan posisi yang

tersedia. Logika ilmiah yang hendaknya terbangun kokoh bagi alumni UIN nanti adalah adanya kesatuanpaduan antara ayat-ayat *ilahiyah* dengan ayat-ayat *kauniyah*.

Integrasi keilmuan diupayakan itu bukan sekadar tataran konsep dan wacana, akan tetapi ia harus dikembangkan dalam bentuk yang aplikatif dan konkrit. Hubungan personal dari dan oleh antar elemen dan unsur-unsur yang ada harus diarahkan pada hubungan yang terbuka, (*ta'aruf*). Keterbukaan akan melahirkan saling memahami (*tafahum*) dan pada akhirnya sikap saling menghargai (*tadhamun*) yang sangat diperlukan dalam mengerakan roda organisasi yang begitu besar dan penting ini. Hubungan harmonis dan saling mengerti semua pihak dipastikan tidak akan membunuh sikap obyektif, kritis dan rasional, sebab dalam Islam sifat untuk saling menasehati adalah perilaku yang dianjurkan.

#### *f. Lahirnya Sekolah - Sekolah Islam Unggulan*

Bentuk terkini pendidikan Islam yang mulai berkembang sejak awal 1990-an adalah model sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam hasil modifikasi antara model pendidikan Islam di lembaga pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan klasikal yang diadopsi dari model sekolah Barat. Dimulai dengan dikembangkannya pendidikan di lingkungan Al-Azhar oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar pada sekitar tahun 1980-an, model pendidikan Al-Azhar ini kemudian banyak diadopsi oleh berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya yang terdapat hampir pada semua daerah yang didukung oleh basis komunitas muslim. Sekolah Al-

Azhar mengandalkan pendidikan Islam bagi pembentukan pribadi muslim didukung oleh *environment* keislaman dengan keberadaan mesjid Al-Azhar yang menjalankan berbagai program dan aktivitas keislaman yang menjadi pendukung utama pendidikan keislaman tersebut. Sekolah Islam Al-Azhar dapat dikatakan merupakan sekolah Islam unggulan pertama yang dijadikan model oleh sekolah-sekolah Islam lainnya yang berkunculan kemudian seperti Al-Izhar di Pondok Labu Jakarta Selatan.

Sekolah Al-Azhar yang berpusat di kompleks mesjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaradja Jakarta Selatan ini telah mewujudkan diri sebagai sebuah jaringan pendidikan Islam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Jumlah sekolah Islam Al-Azhar dewasa ini mencapai 23 buah TK, 23 buah SD, 7 buah SLTP dan 5 buah SMA yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.<sup>45</sup>

Namun, model sekolah unggulan Islam mutakhir mulai menerapkan pola pendidikan diasramakan (*boarding school*) seperti dalam tradisi pesantren yang dilengkapi berbagai infrastruktur pendidikan dengan adanya mesjid, laboratorium dan lainnya.

Di satu sisi, pola pendidikan di sekolah Islam unggulan mengutamakan penguasaan sains dan keterampilan teknologi pada siswanya dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang mendukung tercapainya arah dan tujuan penguasaan kedua bidang tersebut. Di sisi lain, dengan mengadopsi pola pendidikan di asrama seperti yang diterapkan di pesantren dimaksudkan untuk menyediakan

---

<sup>45</sup> Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam...*, h.156

*environment* pendidikan keislaman bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang takwa dan taat menjalankan ajaran agamanya. Model pendidikan komprehensif seperti inilah yang diterapkan di Sekolah Insan Cendekia yang dirintis oleh B.J. Habibie<sup>46</sup> dan sekolah Madania di Parung, Bogor yang dikelola oleh Yayasan Madania.<sup>47</sup> Sekolah Islam unggulan seperti ini berkembang pesat dan belakangan banyak sekali didirikan, seperti Nurul Fikri yang semula hanya mengelola bimbingan belajar bagi siswa akhirnya mengembangkan sekolah Islam unggulan<sup>48</sup>.

Kekuatan model sekolah unggulan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai penerapan kurikulum dan metode pendidikan dengan alokasi waktu yang menyeimbangkan antara pendidikan agama bagi pembentukan watak dan pribadi siswa dengan kurikulum umum.

Perkembangan sekolah Islam unggulan terutama berkaitan dengan makin meningkatnya *ghirah* (semangat) keagamaan masyarakat muslim Indonesia pada dekade akhir abad ke-20. Makin meningkatnya jumlah generasi terdidik yang berasal dari keluarga muslim, terutama mereka yang menyelesaikan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi umum, telah turut mendorong meningkatnya

---

<sup>46</sup> Sekolah Menengah Umum/MAN Insan Cendekia didirikan pada tahun 1996 oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) atas dukungan pembiayaan dari BPPT bekerja sama dengan *Islamic Development Bank* (IDB).

<sup>47</sup> Sekolah Menengah Umum (SMU) Madania Boarding School didirikan pada tahun 1996 di bawah Yayasan Madania yang diprakarsai oleh Dr. Nurcholish Madjid. Sebagai nilai tambah dan keunggulan SMU Madania diterapkan kurikulum plus yang mengandung tiga dimensi kualitas, yaitu: (1) spiritualitas Islam yang termasuk di dalamnya hikmah dan filosofi ibadah-ibadah formal, (2) akhlak dan kepribadian, dan (3) kepemimpinan. Ketiga orienasi kualitas ini sebagian besar menjadi bagian dari program pengasuhan dan keagamaan di asrama dan beberapa termasuk ke dalam mata pelajaran reguler.

<sup>48</sup> Nurhayati Djamal, *Dinamika Pendidikan Islam.....*, h.198



kebutuhan mereka untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya yang selain dapat memberikan bekal penguasaan pengetahuan umum juga mampu memberikan pendidikan agama sebagai bekal bagi pembentukan pribadi muslim. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong meluasnya pembentukan sekolah-sekolah Islam unggulan bagi anak-anak keluarga muslim terdidik.

Meningkatnya jumlah generasi terdidik yang berasal dari keluarga muslim merupakan basis pendukung bagi kelahiran dan perkembangan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990 dan bersamaan dengan akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Meskipun kelahiran ICMI tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik seputar kekuasaan Presiden Soeharto, lembaga ini sempat berperan sebagai pendorong bagi munculnya gagasan kreatif yang melahirkan banyak program sosial yang bermanfaat bagi kepentingan muslim, mulai dari yang berbentuk program ekonomi yang diarahkan untuk mengangkat nasib kaum dhuafa seperti program dompet dhuafa, gagasan tentang bank muamalah dan bank syariah, BMT, sampai kepada sekolah Islam unggulan yang sebagian mengadopsi model pendidikan pesantren.

Integrasi keilmuan diupayakan itu bukan sekadar tataran konsep dan wacana, akan tetapi ia harus dikembangkan dalam bentuk yang aplikatif dan konkrit. Hubungan personal dari dan oleh antar elemen dan unsur-unsur yang ada harus diarahkan pada hubungan yang terbuka, (*ta'aruf*). Keterbukaan akan melahirkan saling memahami (*tafahum*) dan pada akhirnya sikap saling menghargai (*tadhamun*) yang sangat diperlukan dalam mengerakan roda organisasi yang begitu besar dan penting ini. Hubungan harmonis dan saling

mengerti semua pihak dipastikan tidak akan membunuh sikap obyektif, kritis dan rasional, sebab dalam Islam sifat untuk saling menasehati adalah perilaku yang dianjurkan. *Tawashaw bil haq, tawashaw bis shabr.*

Akhirnya, mengkritik dengan ikhlas dan menerima kritikan dengan ikhlas pula adalah pertanda yang baik untuk sebuah perubahan. Perubahan tidak akan pernah ada, jika tidak dikebut dan direbut. Dikebut dan direbut saja belum tentu dapat, apalah jadinya jika kita harus menunggu perubahan sambil bertopang dagu, menyesali nasib, menyalahkan gempa, dan sebagainya.

Demikian perluasan dan pengembangan pokok-pokok pemikiran pendidikan tersebut tentu menjadi tugas bersama bagi para pemikir pendidikan era sekarang ini. Apabila kita tetap berusaha mengembangkan dan memperluasnya, maka pokok-pokok pikiran tersebut akan jauh menjadi lebih sempurna dan komplit serta akan menambah wawasan yang luas bagi perkembangan pendidikan Islam itu sendiri.

Tanpa mengingkari kekurangan-kekurangan, saran-saran dan kritik yang ditujukan kepada pemikiran pendidikan Islam oleh Mastuhu di atas, apabila kita mencari relevansinya bagi dunia pendidikan Islam sekarang, maka teori-teori Mastuhu ini tetap memiliki relevansi dan kontribusi yang kuat.

Pemikiran Mastuhu tetap menjadi ruh bagi pengembangan pendidikan Islam sekarang. Bagaimana pola dan bentuk pengembangannya, semua itu akan berpulang kepada kita semua. Pengembangan pemikiran tersebut tetap akan menjadi harapan dan sekaligus tantangan bagi para pemikir pendidikan selanjutnya.

Disamping itu pula, karena pendidikan Islam merupakan sebuah sistem, maka semua komponen yang berkaitan erat didalamnya harus diperbaharui, kecuali, komponen yang memang harus tetap seperti komponen dasar dan tujuan pendidikan Islam. Jadi jika semua itu dikatakan dengan pendidikan Islam, maka masalahnya adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam sebagai spirit atau ruh bagi lahirnya manusia yang memiliki orientasi ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila pendidikan Islam tidak berperan aktif, maka hanya akan berfungsi marginal dan akan melahirkan manusia-manusia yang asing dari arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.